

ANALISIS *VALUE FOR MONEY* DALAM KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA RETRIBUSI JASA PASAR (STUDI PADA PASAR INDUK RAU KOTA SERANG)

Louisa Santoso¹, Fat'Chatus Chanifa Jikhan ²

^{1,2} Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

chanifa@untirta.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah pada Retribusi Jasa Pasar di Pasar Induk Rau Kota Serang dengan menggunakan pendekatan Value for Money (VFM). Pendekatan ini digunakan karena tidak hanya menilai kinerja dari sisi keuangan semata, tetapi juga melihat bagaimana sumber daya dikelola dan dimanfaatkan secara optimal melalui tiga aspek utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kualitas pengelolaan retribusi jasa pasar serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Data yang dianalisis diperoleh dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya pada pos Retribusi Jasa Pasar, serta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan aktivitas dan operasional Pasar Induk Rau Kota Serang dalam periode penelitian. Seluruh data tersebut diolah untuk mengukur tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan retribusi jasa pasar. Hasil dari masing-masing komponen Value for Money kemudian dianalisis dan dibandingkan untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan daerah secara menyeluruh. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh informasi yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan retribusi pasar agar lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Value for Money, Kinerja Keuangan, Retribusi Jasa Pasar, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Abstract

This study aims to analyze the regional financial performance of Market Service Levies at Rau Central Market in Serang City using the Value for Money (VFM) approach. This approach is used because it not only assesses performance from a purely financial perspective but also examines how resources are managed and utilized optimally through three main aspects: economy, efficiency, and effectiveness. With this approach, the study is expected to provide a more comprehensive picture of the quality of market service levy management and its contribution to Serang City's Local Own-Source Revenue (PAD). The research method used is quantitative descriptive. The data analyzed were obtained from the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) realization reports, particularly from the Market Service Retribution item, as well as other supporting data related to the activities and operations of Rau Central Market in Serang City during the research period. All of this data were processed to measure the level of economy, efficiency, and effectiveness in the management of market service retribution. The results of each Value for Money component were then analyzed and compared to determine the overall condition of regional financial performance. Through this

research, it is expected that information can be obtained to serve as a basis for evaluation by the local government in improving market retribution management to be more optimal and sustainable. Keyword: Value for Money, Performance, Retribution, Local Original Income (PAD)

A. Pendahuluan

Value for Money adalah sebuah konsep yang mengevaluasi kinerja organisasi di sektor publik berdasarkan sejauh mana suatu program berhasil, merujuk pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dengan menerapkan konsep ini, informasi dapat disajikan dalam bentuk indikator untuk menilai apakah pengeluaran anggaran memberikan manfaat tertentu bagi masyarakat. Sektor publik sering dianggap tempat terjadinya inefisiensi, pemborosan, kebocoran dana, dan lembaga yang selalu mengalami kerugian. Ada tuntutan baru agar organisasi sektor publik mempertimbangkan *value for money* dalam pelaksanaan kegiatannya.

Metode *value for money*, selain penilaian finansial, terdapat juga penilaian kinerja non-finansial, yang menilai kualitas pelayanan dengan memperhatikan konsistensi yang memenuhi harapan dari pelanggan yang ditargetkan. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk merencanakan kegiatan publik yang dinyatakan dalam bentuk uang dan juga dapat digunakan untuk mengendalikan. Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat pencapaian hasil dalam pengelolaan keuangan daerah yang mencakup penerimaan dan pengeluaran, menggunakan instrumen keuangan yang ditetapkan oleh kebijakan atau peraturan selama periode anggaran tertentu. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan sebagai acuan untuk: 1. Menilai kemampuan keuangan daerah dalam membiayai otonomi daerah. 2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam penerimaan daerah. Evaluasi kinerja keuangan daerah adalah proses yang bertujuan untuk menilai dan meninjau kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa keuangan daerah dikelola dengan cara yang efektif, efisien, dan transparan demi mencapai sasaran pembangunan daerah.

Menurut Pasal 1 Angka 9 Perda Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah, jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Mengenai objek retribusi daerah sendiri terdiri tiga bagian yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu. Setelah melakukan penelitian awal pada lokasi penelitian, terlihat beberapa masalah pada retribusi parkir di tepi jalan umum di beberapa titik seperti, Pasar Lama, Royal, Stadion Maulana Yusuf dan Pasar Rau Kota Serang yang dikelola oleh UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Serang Pendapatan asli daerah dari retribusi yang diperoleh oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang pada

periode Januari sampai Juni 2020 hanya mencapai 10% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 2,4 miliar, dengan realisasi hanya sebesar Rp 258 juta. Pada tahun 2019, Dishub mampu meraih 35%. Ketua Komisi III yang membidangi keuangan daerah DPRD Kota Serang, Tubagus Ridwan Akhmad, mengungkapkan bahwa kenaikan pendapatan asli daerah masih belum memenuhi harapan. Dia menambahkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kota Serang saat ini hanya sekitar 18% dari total Pendapatan APBD Kota Serang tahun 2020, yang mencapai Rp 1,382 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp 42 miliar dibandingkan dengan APBD murni 2020 yang sebesar Rp 1,424 triliun.

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 pasal 3 huruf (F) tentang Retribusi Jasa Pasar. Retribusi jasa pasar ini merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah Kota Serang yang terdapat dalam retribusi daerah. Adapun perdagangan pasar-pasar tradisional di Kota Serang yang dapat berkontribusi besar bagi pemasukan pendapatan daerah melalui retribusinya sebagai berikut:

Tabel 1 Target & Realisasi Retribusi Pasar Induk Rau Kota Serang

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1.	2016	Rp.625,000,000	Rp.464,661,700.00	74.35%
2.	2017	Rp.590,000,000	Rp.562,014,897	95.26%
3.	2018	Rp.660,000,000	Rp.615,102,600	93.20%
4.	2019	Rp.560,000,000	Rp.374,756,000	66.92%

Sumber: Diolah dari UPT Pasar Kota Serang

Pada data diatas peneliti menemukan permasalahan bahwa retribusi pelayanan pasar di Pasar Induk Rau Kota Serang belum pernah mencapai realisasi 100%, hal yang menarik adalah Pasar Induk Rau merupakan pusat perbelanjaan pasar tradisional terbesar di Kota Serang dan ramai dikunjungi oleh masyarakat. Dengan banyaknya yang berkunjung ke Pasar Induk Rau, seharusnya pendapatan pada setiap pedagang pun meningkat, sehingga dapat membayar uang retribusi dengan disiplin setiap harinya.

Dalam menentukan target pendapatan retribusi Pasar Induk Rau serang baiknya direalisasikan dengan perhitungan dan data berkaitan dengan jumlah kios, los dan pk1. Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pasar Kota Serang, jumlah kios, los dan K5 di Pasar Induk Rau Sebagai Berikut:

Tabel 2 Data Jumlah Bangunan dan Tarif Retribusi Pasar Induk Rau Kota Serang

Nama Pasar	Luas Bangunan	Jumlah Bangunan Keseluruhan			Total
		Kios	Los	K5	

Pasar Rau	57.000 M2	2856	1685	284	4825
		Jumlah Bangunan Yang Terisi			Total
		Kios	Los	K5	
		1478	1227	284	2989
		Tarif Retribusi (Rp)			Total
		1000	2000		
		2839	150		2989

Sumber : Diolah dari UPT Pasar Kota Serang

Data tabel diatas menyatakan bahwa total keseluruhan kios, los dan k5 di Pasar Induk Rau adalah 4.825, dan jumlah keseluruhan kios, los dan k5 yang terisi di Pasar Induk Rau sebanyak 2.989. Dengan ini dapat dilihat retribusi pasar di Pasar Induk Rau memiliki potensi dari masing-masing kios, los dan k5 yang luas bangunannya <10 M2 dikenakan Rp.1000/hari dan kios, los dan k5 yang luas bangunannya >10 M2 dikenakan Rp.2000/hari sebagai berikut:

Tabel 3 Potensi Retribusi Pasar Induk Rau

Nama Bangunan	Luas Bangunan	Perhari	Perbulan	Pertahun
Kios	< 10 M2 Rp.1000/ Hari	Rp.2.839.000	Rp.85.170.000	Rp.1.022.040.00
Los				
K5				
Kios	> 10 M2 Rp.2000/ Hari	Rp.300.000	Rp.9.000.000	Rp.108.000.000
Los				
K5				
Total Potensi Retribusi Pasar Induk Rau				Rp.1.130.040.000

Sumber: Peneliti 2025

Jika jumlah retribusi ukuran luas bangunan <10 M2 dan jumlah retribusi luas bangunan >10 M2 keduanya dijumlahkan maka Rp.1.022.040.000+Rp.108.000.000 = Rp.1.130.040.000 (satu milyar seratus tiga puluh juta empat puluh ribu rupiah) jumlah ini jauh lebih besar dari yang di targetkan dari UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pasar Kota Serang yang sebesar Rp.560.000.000 (tahun 2019), hal ini dengan asumsi semua kios, los dan k5 tertib membayar uang retribusi Pasar Induk Rau setiap harinya.

Pada tahun terakhir 2019 realisasi pendapatan retribusi pasar dari Pasar Induk Rau Kota Serang berdasarkan data dari UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pasar Kota Serang sebesar Rp.374,756,000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah). Nilai ini baru 66,92% dari yang ditargetkan UPT Pasar Kota Serang, yaitu sebesar Rp.560,000,000/Tahun. Apabila juga pengawasan dan penarikan retribusi lebih dilaksanakan

dengan baik lagi, maka realisasi retribusi akan mencapai target, dan dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Serang.

Kota Serang merupakan salah satu kota yang cukup besar dan mempunyai beberapa titik parkir ditepi jalan umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Berdasarkan Pasal 81 Angka 1 Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Pendapatan Asli Daerah yang diterima dari retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Serang. Capaian Pendapatan Asli Daerah dari retribusi di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang sejak Januari hingga Juni 2020 hanya 10%, targetnya sebesar Rp 2,4 miliar dan realisasinya hanya Rp. 258 juta, tahun 2019 Dishub hanya mampu mencapai 35%.¹ Ketua Komisi III Bidang Keuangan daerah DPRD Kota Serang, Tubagus Ridwan Akhmad menyebut pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah belum memuaskan. Pendapatan Asli Daerah Kota Serang bahkan menurutnya saat ini hanya mampu menyumbang sekitar 18% dari total Pendapatan APBD Kota Serang pada 2020 yaitu sebesar Rp 1,382 triliun. Jumlah tersebut berkurang Rp 42 miliar dari APBD murni 2020 sebesar Rp 1,424 triliun.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merujuk pada hasil dari aktivitas atau program yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan terkait dengan pemanfaatan anggaran daerah dengan ukuran yang dapat diukur baik kuantitas maupun kualitasnya. Kemampuan suatu daerah dapat dinilai berdasarkan efisiensi layanan yang diberikan kepada masyarakat. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menggambarkan sejauh mana suatu daerah mampu mengidentifikasi dan mengelola sumber keuangan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan, guna mendukung sistem pemerintahan, layanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerah tanpa sepenuhnya bergantung pada dukungan dari pemerintah pusat, serta memiliki kebebasan dalam penggunaan dana untuk kepentingan masyarakat daerah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari berbagai definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari hasil pekerjaan dalam aspek keuangan daerah, yang mencakup anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui kebijakan atau regulasi yang berlaku selama periode anggaran. Organisasi di sektor publik, termasuk pemerintah, memiliki tujuan untuk memberikan layanan publik kepada masyarakat dengan seoptimal mungkin, contohnya

dalam sektor pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi, dan lain-lain. Layanan publik diberikan kepada masyarakat yang merupakan salah satu pemangku kepentingan organisasi di sektor publik, oleh karena itu Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD sebagai wakil rakyat dalam pemerintahan.

Dengan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah memerlukan sistem penilaian kinerja yang dirancang untuk membantu manajer publik mengevaluasi pencapaian suatu strategi melalui indikator finansial dan non-finansial. Sistem penilaian kinerja ini juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan organisasi. Kinerja yang optimal bagi Pemerintah Daerah terwujud ketika administrasi dan penyediaan layanan dilaksanakan secara ekonomis, efektif, dan efisien.

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Adisasmita, 2011).

Dimana tanggung jawab keuangan merupakan inti dari konsep desentralisasi, diantara pengaturan pembiayaan yang harus dipertimbangkan adalah : (1) Penerapan retribusi; (2) penerapan pungutan perbaikan; (3) Adopsi pendanaan bersama; (4) Perluasan sumber pendapatan umum untuk barang publik; (5) mengalokasikan pendapatan khusus atau dana dari sumber-sumber pendapatan tertentu seperti pajak, bea masuk, biaya dan denda, pajak hiburan atau entertainment yang digunakan untuk infrastruktur dan layanan pedesaan; (6) Mobilisasi sumberdaya pemerintah (melalui jaminan pelayanan atau kredit bersubsidi) agar individu dapat memperoleh pinjaman dari penyedia swasta; (7) pertukaran jasa atau tenaga kerja dari penerima manfaat dengan imbalan perpanjangan layanan atau infrastruktur oleh pemerintah daerah; (8) mengumpulkan dana dalam kegiatan sosial seperti pameran komunitas yang akan digunakan untuk dana sosial; dan (9) penciptaan kegiatan produktif masyarakat skala kecil untuk mengumpulkan dana bagi penyediaan layanan dan pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan (Rondinelliet et.al.,1986).

Menurut Mardiasmo (2002) menyatakan Value for money berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses pengelolaan keuangan publik yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (public money) dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna).

Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan publik.

Salah satu konsep yang bisa digunakan untuk menilai/mengukur kinerja adalah konsep Value for Money. Pengukuran kinerja Value for Money adalah pengukuran kinerja untuk mengukur nilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi.

Value for money adalah ide yang digunakan untuk menilai seberapa efisien, ekonomis, dan bermanfaat suatu program, aktivitas, dan kinerja suatu organisasi. Ekonomi berkaitan dengan upaya organisasi sektor publik untuk mengurangi penggunaan sumber daya dengan menghindari pengeluaran yang sia-sia dan berlebihan, efisiensi dalam mencapai hasil maksimum dengan sejumlah input tertentu, serta efektivitas dalam memperoleh hasil program yang sesuai dengan tujuan yang valid (Wuwungan, et al. , 2019). Indikator pengukuran kinerja pada prinsip value for money terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Ekonomi terkait dengan pengkonversian input primer berupa sumber daya keuangan menjadi input sekunder berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur, dan barang modal yang dikonsumsi untuk kegiatan operasi organisasi. Konsep ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh nilai input. Ekonomi memiliki pengertian bahwa sumber daya input hendaknya diperoleh dengan harga yang lebih rendah (spending less), yaitu harga yang mendekati harga pasar. atau harga yang mendekati harga pasar (Mahmudi,2010:59).
2. Efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Secara matematis, efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau output per unit input. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (spending well). Untuk mendapatkan tingkat efisiensi, dapat menggunakan formula sebagai berikut: Efisiensi = Output : Input.
3. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada output atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome.

Tuntutan masyarakat dalam value for money adalah ekonomis (hemat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam arti bahwa penggunaan/ pengorbanannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti pencapaian tujuan dan sasaran. Indikator efisiensi dan efektivitas harus digunakan secara bersama-sama. Karena di satu pihak mungkin pelaksanaannya sudah dilakukan secara

ekonomis dan efisien akan tetapi output yang dihasilkan tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Atau di lain pihak sebuah program dapat dikatakan efektif dalam mencapai tujuan. Akan tetapi mungkin dicapai dengan cara yang tidak ekonomis dan efisien. Jika suatu program efektif dan efisien maka program yang dijalankan dapat dikatakan cost-effectiveness. Indikator efektivitas biaya merupakan kombinasi informasi efisiensi dan efektivitas dan dapat memberikan ukuran kinerja bottom line yang dalam sektor publik diidentikkan dengan pelayanan publik.

Tingkat input, output, dan outcome perlu dipahami terlebih dahulu untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dalam pengukuran kinerja baik yang terkait dengan aspek keuangan maupun non-keuangan melalui metode value for money. Langkah awal bagi suatu organisasi adalah mengidentifikasi input, output, dan outcome, dan segala hal tersebut harus dihubungkan dengan tujuan, visi, dan misi organisasi. Proses kerja dan metode pengukuran value for money dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Input: adalah sumber daya yang dimanfaatkan untuk menerapkan kebijakan, program, dan kegiatan tertentu. Contoh input mencakup tenaga medis di rumah sakit, guru di sekolah, anggota kepolisian di kepolisian daerah, serta pegawai di lembaga. Input ini juga bisa berupa uang, seperti biaya untuk tenaga medis, gaji guru, dan nilai tanah.
2. Output: merupakan produk yang dihasilkan dari suatu program dan kebijakan, indikator output menandakan hasil dari pelaksanaan program atau kegiatan. Misalnya, output yang dicapai oleh kepolisian adalah penegakan hukum dan meningkatnya rasa aman di masyarakat, yang diukur melalui penurunan angka kejahatan
4. Outcome: adalah efek yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan tertentu. Outcome sering kali berhubungan dengan tujuan atau target yang ingin dicapai. Sebagai contoh, outcome dari layanan kebersihan adalah terwujudnya lingkungan kota yang aman, bersih, dan sehat.

Ekonomi merujuk pada cara memperoleh sumber daya tertentu dengan biaya paling rendah. Ekonomi juga bisa diartikan sebagai perbandingan antara input dan nilai input yang dinyatakan dalam uang. Bidang ini berhubungan dengan kemampuan sektor publik dalam mengurangi penggunaan sumber daya dengan cara menghindari pengeluaran yang tidak efisien dan boros. Pengukuran efektivitas hanya fokus pada hasil yang diperoleh, sementara pengukuran ekonomi berorientasi pada input yang digunakan. Ekonomi adalah ukuran yang bersifat relatif. Formula untuk mengukur ekonomi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}}$$

Tabel 4 Kriteria Ekonomi Kinerja Keuangan

No	Kinerja Keuangan (%)	Kriteria Penilaian
1	> 100	Tidak Ekonomis
2	80-100	Kurang Ekonomis
3	60-80	Cukup Ekonomis
4	40-60	Ekonomis
5	< 40	Sangat Ekonomis

Sumber : Mahmudi (2015)

Efisiensi sangat berkaitan dengan ide produktivitas. Untuk mengukur efisiensi, kita membandingkan hasil yang diperoleh dengan sumber daya yang digunakan (biaya output). Suatu proses operasi dapat dianggap efisien jika menghasilkan produk atau output tertentu dengan memanfaatkan sumber daya dan dana sesedikit mungkin (pengeluaran yang bijaksana). Efisiensi adalah aspek penting dari tiga pokok bahasan nilai untuk uang. Jika dibandingkan dengan ekonomis dan efektivitas, efisiensi merupakan salah satu komponen dari indikator nilai untuk uang yang dapat diukur melalui rasio antara output dan input. Berikut adalah rumus untuk mengukur efisiensi:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}}$$

Dalam pengukuran kinerja *value for money*, efisiensi dapat dibagi menjadi dua, sebagai berikut:

1. Efisiensi alokasi. Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal.
2. Efisiensi teknis atau manajerial. Efisiensi teknis (manajerial) terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu.

Tabel 5 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

No	Kinerja Keuangan (%)	Kriteria Penilaian
1	> 100	Tidak Efisien
2	90-100	Kurang Efisien

3	80-90	Cukup Efisien
4	60-80	Efisien
5	< 60	Sangat Efisien

Sumber: Mahmudi (2015)

Efektivitas pada dasarnya berkaitan dengan keberhasilan dalam mencetak tujuan atau sasaran kebijakan (hasil yang digunakan). Efektivitas menunjukkan hubungan antara hasil dan tujuan atau target yang harus dicapai. Suatu kegiatan operasional dianggap efektif apabila prosesnya berhasil mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (pengeluaran yang bijak). Efektivitas adalah sebuah indikator seberapa sukses organisasi dalam meraih tujuannya. Ketika sebuah organisasi mampu mencapai tujuannya, maka bisa dikatakan bahwa organisasi tersebut telah beroperasi dengan efektif. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa efektivitas tidak berkaitan dengan jumlah biaya yang dihabiskan untuk mencapai tujuan. Efektivitas hanya mempertimbangkan apakah program atau kegiatan tertentu telah mencapai sasaran yang telah ditentukan. Rumus untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}}$$

Tabel 6 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

No	Kinerja Keuangan (%)	Kriteria Penilaian
1	> 100	Sangat Efektif
2	80-100	Efektif
3	60-80	Cukup Efisien
4	40-60	Kurang Efektif
5	< 40	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2015)

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulisan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya”. Metode kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filosofi positivisme, dirancang untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan alat penelitian, dan data yang

dianalisis bersifat kuantitatif atau statistik, bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Jenis data yang digunakan dalam studi ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi: Data Sekunder, yakni informasi atau dokumen yang dikumpulkan dalam bentuk laporan keuangan dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu cara untuk mengumpulkan dokumen-dokumen dengan memastikan bukti yang akurat dari catatan sumber informasi khusus seperti tulisan, wasiat, buku, peraturan, dan lain-lain. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari:

1. Pengumpulan Data: adalah proses mencari informasi di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Keakuratan alat pengumpulan data dan kualifikasi pengumpul data sangat penting untuk mendapatkan data yang berkualitas.
2. Reduksi Data: adalah suatu analisis yang memperjelas, mengklasifikasikan, mengarahkan, menghapus yang tidak diperlukan, dan mengorganisir data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil dan diverifikasi.
3. Penyajian Data: adalah langkah dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan, sehingga dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Penyajian data harus sederhana dan jelas agar mudah dibaca.

C. Hasil Dan Pembahasan

**Tabel 7. Laporan Realisasi Anggaran SKPD Per Rekening Rincian Obyek
Pemerintah Kota Serang Provinsi Banten Tahun 2022**

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih / (kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	201.435.090.000,00	179.580.982.252,00	(21.854.107.748,00)	89,15
4.1.01	Pajak Daerah	200.855.090.000,00	179.478.181.686,00	(21.379.908.314,00)	31,36
4.1.01.06	Pajak Hotel	17.050.000.000,00	5.346.545.466,00	(11.703.454.534,00)	31,36
4.1.01.06.03	Pajak Hotel	16.961.200.000,00	5.232.371.966,00	(11.728.828.034,00)	30,85
4.1.0.06.03	Pajak Losmen	88.800.000,00	114.173.966,00	25.373.500,00	128,57
4.1.01.07	Pajak Restoran	26.700.000.000,00	28.068.076.748,00	1.368.076.748,00	105,12
4.1.01.07.04	Pajak Restoran dan Sejenisnya	20.100.000.000,00	25.358.871.971,00	5.258.871.971,00	126,16
4.1.01.07.02	Pajak Rumah makan dan sejenisnya	5.240.000.000,00	1.294.313.384,00	(3.945.686.616,00)	24,70
4.1.01'.07.04	Pajak kantin dan sejenisnya	60.000.00,00	141.510.057,00	81.510.057,00	235,85
4.1.01.07.07	Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya	1.300.000.000,00	1.273.381.336,00	(26.618.664,00)	97,95
4.1.01.08	Pajak hiburan	3.150.000.000,00	3.234.983.604,00	84.983.604,00	102,70
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	1.100.000.000,00	1.275.583.637,00	175.583.637,00	115,96
4.1.01.08.07	Pajak permainan billiard dan bowling	12.000.000,00	12.803.000,00	803.000,00	106,69
4.1.01.08.08	Pajak pacuan kuda ,kendaraan bermotor,dan permainan ketangkasan	1.975.000.000,00	1.789.549.615,00	(185.450.385,00)	90,61
4.1.01.08.09	Pajak panti pijat ,Refleksi,Mandi uap/Spa dan pusat kebugaran (Fitness Center)	42.000.000,00	130.108.202,00	88.108.202,00	309,78
4.1.01.08.10	Pajak pertandingan olahraga	21.000.000,00	26.939.150,00	5.939.150,00	128,28
4.1.01.09	Pajak Reklame	14.000.000,00	8.761.731.223,00	(5.463.268.777,00)	62,58
4.1.01.09.03	Pajak Reklame papan / billboard	12.635.500.000,00	7.182.261.598,00	(5.453.238.402,00)	56,84

4.1.01.09.02	Pajak Reklame kain	164.000.000,00	117.089.625,00	(46.910.375,00)	71,40
4.1.01.09.03	Pajak Reklame melekat/stiker	500.00,00	0,00	(500.000,00)	0,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame berjalan	1.200.000,00	1.462.380.000,00	262.380.000,00	121,86
4.1.01.09.06	Pajak Reklame udara	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.10.02	Pajak penerangan jalan	36.655.710.000,00	37.075.851.410,00	420.141.410,00	101,15
4.1.01.11.01	Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri	36.649.210.000,00	37.069.650.152,00	420.440.152,00	101,15
4.1.01.11.02	Pajak penerangan jalan sumber lain	6.500.000,00	6.201.258,00	(298.742,00)	95,40
4.1.01.11	Pajak parkir	5.399.380.000,00	1.145.668.983,00	(4.253.711.017,00)	21,22
4.1.01.12	Pajak air tanah	3.800.000,00	1.102.293.238,00	(2.697.706.762,00)	29,01
4.1.01.12.01	Pajak air tanah	3.800.000,00	1.102.293.238,00	(2.697.706.762,00)	29,01
4.1.01.15	Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2)	36.500.000.000,00	36.697.827.848,00	197.827.848,00	100,54
4.1.01.15.01	PBBP2	36.500.000.000,00	36.697.827.848,00	197.827.848,00	100,54
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	57.600.000.000,00	58.042.203.166,00	442.203.166,00	100,77
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	57.600.000.000,00	58.042.203.166,00	442.203.166,00	100,77
4.1.02	Retribusi Daerah	80.00.000,00	9.000.000,00	(71.000.000,00)	11,25
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	80.00.000,00	9.000.000,00	(71.000.000,00)	11,25
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	80.00.000,00	9.000.000,00	(71.000.000,00)	11,25
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	500.000.000,00	96.800.566,00	(403.199.434,00)	19,36
4.1.04.09	Penerimaan Komisi ,Potongan,at au Bnetuk Lain	0,00	10.810.632,00	10.810.632,00	0,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi ,Potongan,at au Bentuk Lain	0,00	10.810.632,00	10.810.632,00	0,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	500.000.000,00	85.989.932,00	(414.010.066,00)	17,20
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	300.000,00	90.200,00	(209.800,00)	30,07
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	2.900.000,00	2.147.705,00	(752.295,00)	74,06

4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Reklame	40.025.000,00	0,00	(40.025.000,00)	0,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	40.025.000,00	0,00	(40.025.000,00)	0,00
4.1.04.12.10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	50.000,00	0,00	(50.000,00)	0,00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	300.000,00	224.194,00	(75.806,00)	74,73
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Air Tanah	50.000,00	0,00	(50.000,00)	0,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi (PBBP2)	456.225.000,00	83.218.490,00	(373.006.510,00)	18,24
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	201.435.090.000,00	179.580.982.252,00	(21.854.107.748,00)	89,15
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	26.163.861.555,00	23.954.336.929,00	(2.209.524.626,00)	91,56
5.1.01	Belanja Pegawai	14.683.774.526,00	12.940.692.317,00	(1.743.082.209,00))	88,13
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.006.943.728,00	1.982.830.607,00	(24.113.121,00)	98,80
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok	1.404.441.289,00	1.396.064.900,00	(8.376.389,00)	99,40
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	146.553.478,00	145.744.846,00	(808.632,00)	99,45
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	162.821.100,00	161.850.000,00	(971.100,00)	99,40
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	29.033.160,00	28.880.000,00	(173.160,00)	99,40
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	28.987.890,00	28.815.000,00	(172.890,00)	99,40
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	90.995.295,00	90.525.000,00	(470.295,000)	99,48
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN	3.642.511,00	3.618.320,00	(24.191,00)	99,34
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	23.118,00	23.006,00	(112,00)	99,52
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	116.476.095,00	115.808.024,00	(668.071,00)	99,43

5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.897.622,00	2.880.340,00	(17.282,00)	99,40
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.693.018,00	8.641.171,00	(51.847,00)	99,40
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	12.379.152,00	0,00	(12.379.152,00)	0,00
5.1.01.03	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.520.696.298,00	2.505.351.550,00	(15.344.748,00)	99,39
5.1.01.03.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	2.226.206.031,00	2.216.187.343,00	(10.018.688,00)	99,55
5.1.01.03.07	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi kerja ASN	294.490.267,00	289.164.207,00	(5.326.060,00)	98,19
5.1.01.03.07	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.151.859.050,00	7.670.378.606,00	(1.481.480.444,00)	83,81
5.1.01.05	Belanja Intensif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	9.038.479.050,00	7.567.108.606,00	(1.471.370.444,00)	83,72
5.1.01.05.10	Belanja Honorarium	113.380.000,00	103.270.000,00	(222.143.896,00)	91,08
5.1.01.05.10	Belanja Intensif bagi KDH/WKDH	1.004.275.450,00	782.131.554,00	(222.143.896,00)	77,88
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.480.087.029,00	11.013.644.612,00	(466.442.417,00)	95,94
5.1.02.01	Belanja Barang	2.979.955.878,00	2.940.007.945,00	(39.947.933,00)	98,66
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.979.955.878,00	2.940.007.945,00	(39.947.933,00)	98,66
5.1.02.02	Belanja Jasa	4.488.735.151,00	2.940.007.945,00	(39.947.933,00)	98,77
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.422.451.601,00	3.164.567.767,00	(257.883.834,00)	92,46
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	14.968.800,00	12.069.000,00	(2.899.800,00)	80,63
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	100,00

5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	920.914.750,00	902.542.000,00	(18.372.750,00)	98,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus ,Bimbingan	20.400.000,00	20.000.000,00	(400.000,00)	98,04
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	807.930.000,00	796.736.400,00	(11.193.600,00)	98,61
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	607.950.000,00	596.834.300,00	(11,115.700,00)	98,17
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	199.980.000,00	199.902.100,00	(77.900,00)	99,96
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.203,466.000,00	3.067.721.500,00	(135.744.500,00)	95,76
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.203.466.000,00	3.067.721.500,00	(135.744.500,00)	95,76
5.2	BELANJA MODAL	1.667.777.761,00	1.646.033.080,00	(21.744.681,00)	98,70
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.269.377.761,00	1.248.332.180,00	(21.045.581,00)	98,34
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	181.681.500,00	181.681.500,00	0,00	100,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	181.681.500,00	181.681.500,00	0,00	100,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	320.934.061,00	314.922.378,00	(6.011.683,00)	98,13
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	57.880.000,00	54.987,405,00	(2.892.595,00)	95,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	263.054.061,00	259.934.973,00	(3.119.088,00)	98,81

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih / (kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio ,Komunikasi,dan Pemancar	284.150.900,00	279.472.200,00	(4.678.700,00)	98,35
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	284.150.900,00	279.472.200,00	(4.678.700,00)	98,35
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.619.800,00	2.619.800,00	0,00	100,00

5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.619.800,00	2.619.800,00	0,00	100,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	405.171.500,00	394.816.302,00	(10.355.198,00)	97,44
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	247.604.500,00	241.033.784,00	(6.570.716,00)	97,35
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	157.567.000,00	153.782.518,00	(3.784.482,00)	97,60
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	74.820.000,00	74.820.000,00	0,00	100,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	74.820.000,00	74.820.000,00	0,00	100,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	398.400.000,00	397.700.900,00	(699.100,00)	99,82
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	396.000.000,00	395.300.900,00	(699.100,00)	99,82
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	396.000.000,00	395.300.900,00	(699.100,00)	99,82
	JUMLAH BELANJA DAERAH	27.831.639,316,00	25.600.370.009,00	(2.231,269.307,00)	91,98
	SURPLUS / (DEFISIT)	173.603.450.684,00	153.980.612.243,00	(19.622.838.441,00)	88,70
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	173.603.450.684,00	153.980.612.243,00	(19.622.838.441,00)	88,70

Sumber: Penulis (2025)

Berdasarkan hasil Penilaian Value for Money pada Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan daerah adalah analisis Surplus/defisit APBD, derajat desentralisasi fiskal, derajat otonomi fiskal upaya fiskal/posisi fiskal, analisis efisiensi dan efektivitas indeks kinerja pajak dan retribusi daerah, rasio kemandirian daerah, dan kemampuan pinjaman daerah. Pemerintah Provinsi Kota Serang Banten sebagai berikut:

Pengukuran Ekonomis Dalam Menilai Kinerja Keuangan

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} = \frac{23.954.336.929,00}{26.163.861.555,00} = 91,53$$

Evaluasi ekonomis berhubungan dengan sejauh mana organisasi dalam sektor publik dapat mengurangi sumber daya yang dipakai, yaitu dengan cara menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan tidak efisien. Kinerja pemerintah dianggap ekonomis jika rasio yang

diperoleh di bawah seratus persen; semakin rendah rasio ekonomis, semakin baik kinerja yang ditunjukkan. Berdasarkan analisis nilai untuk uang, kinerja keuangan pada tahun 2022 menunjukkan nilai 91,53, yang merupakan indikator sangat ekonomis. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan dengan sangat efisien, sehingga mampu mengontrol belanja dengan cara meminimalkan anggaran agar lebih hemat dan sesuai sasaran.

Pengukuran Efisiensi Dalam Menilai Kinerja Keuangan

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} = \frac{23.954.336.929,00}{179.580.982.252,00} = 13,21$$

Pengukuran Efisiensi menunjukkan perbandingan antara pengeluaran untuk mengumpulkan pendapatan dan jumlah pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan suatu pemerintah dianggap efisien jika rasio yang dihasilkan di bawah seratus persen, dan semakin kecil rasio efisiensi menunjukkan bahwa kinerja semakin baik. Berdasarkan analisis value for money, kinerja keuangan tahun 2022 berada pada angka 13,21 dengan kategori tidak efisien. Ini menandakan bahwa anggaran digunakan secara tidak efektif dan tidak sesuai tujuan dalam melaksanakan program dari satuan kerja yang terbaik, sehingga menghasilkan pendapatan yang optimal dari program tersebut.

Pengukuran Efektivitas Dalam Menilai Kinerja Keuangan

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} = \frac{179.580.982.252,00}{201.435.090.000,00} = 0,61$$

Pengukuran efektivitas mencerminkan sejauh mana tujuan tercapai, yaitu dengan membandingkan pendapatan yang diperoleh dengan anggaran pendapatan yang telah ditentukan. Kinerja keuangan pemerintah dianggap efektif jika rasio yang diperoleh sama dengan atau melebihi seratus persen, semakin tinggi rasio efektivitas menunjukkan bahwa kinerja semakin baik. Berdasarkan analisis value for money, kinerja keuangan pada tahun 2022 terindikasi sebesar 0,61 dengan kategori kurang efektif. Ini menunjukkan bahwa pendapatan yang direalisasikan tidak lebih besar dibandingkan anggaran yang ditetapkan dan program dari satuan kerja tidak berhasil dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Value For Money melalui pengukuran ekonomis dalam menilai kinerja keuangan dengan kriteria sangat ekonomis, dikarenakan mampu meminimalisir anggaran yang digunakan agar lebih hemat dan tepat sasaran pada SKPD Pemerintah Provinsi Kota Serang Banten.
2. Value For Money melalui pengukuran efisiensi dalam menilai kinerja keuangan dengan kriteria efisien, yang belum optimal dengan nilai presentasi rendah pada SKPD Pemerintah Provinsi Kota Serang Banten.
3. Value For Money melalui pengukuran efektivitas dalam menilai kinerja keuangan dengan kriteria kurang efektif, dikarenakan tidak mampu merealisasikan pendapatan sesuai dengan target anggaran pendapatan yang ditentukan pada SKPD Pemerintah Provinsi Kota Serang Banten.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Banten Kota Serang. Dalam Laporan Realisasi Anggaran Per Rekening Obyek Pemerintah Tahun 2022, pada Pendapatan Daerah terhadap pengukuran penilaian secara ekonomis realisasi pendapatan sudah melebihi jumlah Anggaran Pendapatan dan lebih hingga 91,53 % persentase dibandingkan penilaian secara pengukuran Efisiensi serta pengukuran Efektivitas kinerja pegawai sehingga perlu adanya peningkatan terhadap persentase yang rendah.

Adapun beberapa saran berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini bahwa:

1. Pemerintah Kota Serang Pemerintah Kota Serang perlu menetapkan target retribusi jasa pasar yang lebih realistis dan berbasis potensi riil jumlah kios, los, serta tingkat aktivitas perdagangan di Pasar Induk Rau. Selain itu, penguatan pengawasan dan penegakan aturan pembayaran retribusi perlu dilakukan secara konsisten agar tingkat efektivitas penerimaan dapat meningkat.
2. Pengelola Pasar Induk Rau Pengelola pasar disarankan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan retribusi dengan memperbaiki sistem pencatatan dan pemungutan, misalnya melalui digitalisasi pembayaran retribusi. Langkah ini dapat mengurangi kebocoran, meningkatkan transparansi, serta mempermudah pedagang dalam memenuhi kewajibannya.

3. Pedagang Pasar Pedagang diharapkan memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap kewajiban membayar retribusi sebagai bentuk kontribusi terhadap perbaikan fasilitas dan pelayanan pasar. Pembayaran retribusi yang tertib akan mendukung pengelolaan pasar yang lebih baik dan berkelanjutan.
4. Peneliti Selanjutnya Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel non-keuangan, seperti kualitas pelayanan, kepuasan pedagang, dan kondisi sarana prasarana pasar, agar analisis Value for Money menjadi lebih komprehensif dan mendalam.

E. Daftar Pustaka

- Ahmad, I. H. (2017). Pengaruh Sistem Akuntansi, Prinsip Value For Money dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Pemerintah Daerah Kota Makassar). *AkMen JURNAL ILMIAH*, 14(4).
- Andani, B., & Kusumaningsih, R. (2022). Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Retribusi Parkir Kota Serang dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2(1), 54-61.
- Hutagalung, E. (2016). Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 42(1), 1-1.
- Nadidah, N. (2023). Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Mengenai Retribusi Pasar Induk Rau Kota Serang. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 7(1), 9-16.
- Nasir, A. R., & SE, M. (2023). Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Dan Kota Di Indonesia: Membangun Kemandirian Daerah Melalui Pendapatan Asli Daerah. *CV. DOTPLUS Publisher*.
- Nirawati, L., Samsudin, A., Clarinta, L. K., Setiawan, A. T., & Ahamd, H. (2022). Analisis konsep time value of money pandangan kajian ekonomi Islam mengenai pinjaman uang pada bank konvensional. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 5(1), 44-49.
- Novitasari, M. E. I., & Ardini, L. (2021). Pengukuran Kinerja Dengan Pendekatan Value For Money Sebagai Perwujudan Good Governance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(9).

- Nurafifah, I. P., Haliah, H., & Nirwana, N. (2022). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Pendekatan Value For Money (Studi Kasus Pada Kabupaten Nabire Tahun 2019-2021). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 8-14.
- Polii, I. R., Saerang, D. P., & Tangkuman, S. J. (2020). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value for Money. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4).
- Rumasukun, M. R. (2013). *Kinerja Keuangan Otonomi Khusus Di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Dalam Perspektif Teori Kelembagaan* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Sartono, A., & Tjahjono, A. (2018). *Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2012-2016 Berdasarkan Konsep Value For Money* (Doctoral dissertation, STIE Widya Wiwaha).
- Wahyuni, S., Juanda, B., & Fahmi, I. (2017). Kualitas belanja daerah dan hubungannya dengan kinerja pembangunan di provinsi banten. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 6(2), 16-31.